

**“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK  
POLRI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PID/2014 dan Putusan Praperadilan  
Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel)”**

**Thrinaldo Novandi**

**Abstrak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* serta hak-hak korban salah tangkap. Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *Judex Facti*, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan, Bagi korban salah tangkap disarankan untuk diberikan hak-hak berdasarkan KUHP Bab XII berupa ganti kerugian dan rehabilitasi, Penyidik yang melakukan penyidikan salah tangkap dapat dikualifikasikan etika profesi kepolisian serta dapat dikenakan pidana Pasal 333 KUHP, Penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti.

Kata kunci: Polri, Penyidik, Salah tangkap

**“LEGAL PROTECTIONS AND ACCOUNTABILTY OF POLICE  
INVESTIGATORS AGAINST VICTIMS WRONGFUL ARRESTS (ERROR IN  
PERSONA) (Case Study Number: 1055 K/PID/2014 and Study Number:  
98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel)”**

**Thrinaldo Novandi**

**Abstract**

*State police of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement agency that serves taking precautions against an onset of crime and provide protection against the entire community. In the implementation of the criminal law and legal the event criminal the act of the investigation by police as a first step in the process of law enforcement. The problems posed dua ring thesis this is is how accountability police investigators against an onset of any get or error in persona rights victims and wrongful arrests. A victims wrongful arrests in the justice system criminal Indonesia is relatively not treated, and have not provide protection directly against victims. The weakness of the professionalism of the ability of investigators, in the form of a violation of procedure efforts to forcibly that does not respect the principle of presumption not guilty, and the existence of an oversight judge or a mistake that tangible in takes into account judex facti, a factor cause of the wrongful arrests in a criminal offense the murder. Investigators who performs any grasp of investigation can be classified ethics profession police and can be worn criminal 333 kuhp, For the wrong get suggested to given the right rights based on kuhap chapter xii of compensation and rehabilitation. Policy criminal law in protecting the wrongful arrests in a criminal offense murder, this research using data literature namely juridical normative who done by means of research material library or material secondary Collected and analysis and researched.*

*Keywords: police, investigators, wrongful arresst*